

PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG

Amanda Elista, Kismartini & Amni Zarkasyi Rahman

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Masih tingginya angka KDRT di Kota Semarang menjadi permasalahan yang harus segera ditangani bersama. Hal itu dikarenakan KDRT merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Semarang periode 2016-2020. Guna mengurangi angka KDRT diperlukan peranan berbagai stakeholder pemerintah, lembaga masyarakat maupun swasta. Pelaksanaan peran tersebut terdiri atas peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor & akselerator. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek menggunakan *purposive sampling*, kualitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peran stakeholder belum berjalan optimal hal ini terlihat dari ditemukannya permasalahan 1) masih tingginya angka KDRT 2) kurangnya komitmen masyarakat & DP3A 3) kurangnya dana pelaksanaan sosialisasi di level RT/RW. Hasil identifikasi stakeholder terbagi menjadi a) stakeholder pemerintah yang menjalankan peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator & implementor. Pada pelaksanaan peran tersebut ditemukan penyebab masih tingginya angka KDRT karena faktor ekonomi, budaya patriarki, Kota Semarang sebagai kota yang kompleks b) stakeholder lembaga masyarakat sebagai fasilitator & implementor ditemukan penyebab tingginya angka KDRT karena faktor kesadaran warga Kota Semarang untuk melapor c) stakeholder swasta sebagai akselerator telah menjalankan perannya dengan baik melalui CSR. Saran peneliti adalah saling menguatkan komitmen antar stakeholder, APSAI melalui CSR perusahaan dapat menyalurkan dananya untuk stakeholder lain yang kekurangan dana untuk melaksanakan program, masih tingginya angka KDRT dapat ditekan dengan pelatihan ekonomi digital, membangun perspektif adil gender, mendorong masyarakat untuk berani melapor disertai dengan penanganan yang cepat & tepat, membangun kesadaran warga Kota Semarang untuk peduli pada persoalan KDRT.

ABSTRACT

The high number of domestic violence in the city of Semarang is a problem that must be dealt with immediately. This is because domestic violence is the most common type of violence in Semarang from 2016-2020. In order to prevent the increasing number of domestic violence, the role of various government stakeholders, public and private institutions is needed. The implementation of these roles consists of roles as policy creator, coordinator, facilitator, implementor & accelerator. The method in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. Determination of the subject using purposive sampling, data quality using source triangulation. The results of the research show that the implementation of the role of stakeholders has been running quite well, but it is not optimal, this can be seen from the discovery of problems 1) the high number of domestic violence in Semarang 2) lack of community commitment & DP3A to prevent domestic violence 3) lack of funds in carrying out socialization at below level. The results of the identification of stakeholders are divided into a) government stakeholders who carry out the roles of policy creator, coordinator, facilitator & implementor. In carrying out this role, it was found that the cause of the high number of domestic violence was due to economic factors, patriarchal culture, Semarang City as a complex city. b) community institutional stakeholders as facilitators & implementors found the cause of the high number of domestic violence due to the awareness factor of Semarang City residents to report c) private stakeholders as accelerators have carried out their roles well through CSR. The advice given is to strengthen mutual commitment between stakeholders, APSAI through corporate CSR can channel funds to other stakeholders who lack funds to carry out the program, the still high number of domestic violence can be suppressed by digital economic training, build a gender fair perspective, encourage the community to be brave to report accompanied by fast & appropriate handling, building awareness of Semarang City residents to care about domestic violence issues.

Keywords : Roles, Stakeholders, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Program pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Program ini merupakan bagian dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Berdasarkan perda tersebut perlindungan perempuan dan anak

terbagi menjadi 1) program pencegahan tindak kekerasan termasuk KDRT 2) perlindungan hukum 3) pemulihan dan 4) koordinasi. Pencegahan tindak KDRT menjadi persoalan yang sangat urgent di Kota Semarang mengingat masih tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota

Semarang. Berdasarkan data dari DP3A Kota Semarang pada tahun 2016-2020 jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati posisi sebagai jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Kota Semarang, seperti pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus

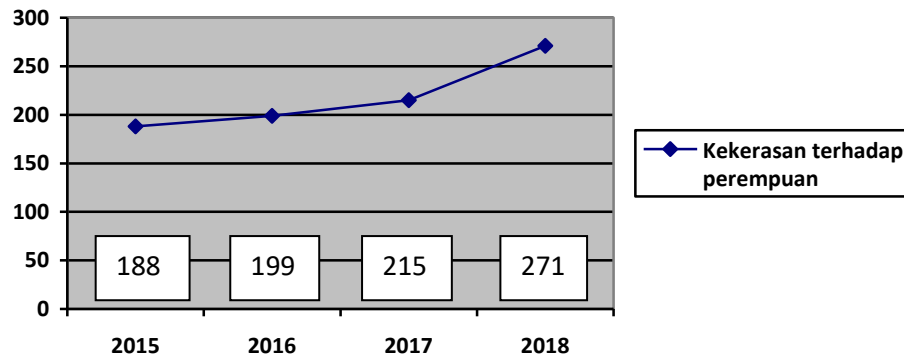
No	Jenis Kasus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Total
1	KTA	---	---	83	49	40	172
2	KDRT	---	---	175	139	107	421
3	ABH	---	---	8	9	5	22
4	KDP	---	---	11	4	1	16
5	KTP	---	---	33	22	10	65
6	<i>Traffiking</i>	---	---	0	0	1	1

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, (2016-2020)

Berdasarkan tabel 1.1 angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang sebanyak 421 kasus sepanjang tahun 2016-2020. Jenis KDRT merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Kota Semarang. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan juga meningkat sepanjang tahun 2015-2018 seperti pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2015-2018



Sumber : Diolah oleh peneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Masalah tingginya angka KDRT terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga perlu dicegah melalui program pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna pelaksanaan program tersebut dibutuhkan adanya peran stakeholder dalam program pencegahan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang. Peran stakeholder merupakan keterlibatan stakeholder dalam suatu program (Nugroho, 2014). Stakeholder merupakan individu, kelompok organisasi baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau

dipengaruhi baik positif maupun negatif oleh suatu kegiatan program pembangunan (Hertifah, 2003). Soesilo (2000) menekankan bahwa usaha atau kegiatan yang melibatkan stakeholder harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang menjadi stakeholder utamanya. Hal tersebut

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan peran stakeholder dalam program pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil indikasi sebagai berikut 1) kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota yang tergabung dalam PPT Seruni (Wati, 2018) 2) Hubungan koordinasi antar stakeholder yang rumit bahkan tidak jelas (Putrihartiwi, 2017) dan Utami (2016) 3) tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga yang menangani pencegahan KDRT (Putrihartiwi, 2017) dan (Utami, 2016) 4) kurang

dikarenakan banyaknya stakeholder yang terlibat dengan tujuan utamanya saling berkaitan (Susilo dkk., 2019). Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam implementasi program membutuhkan hubungan yang baik antar stakeholder, sesuai dengan pendapat dari (Susilo dkk., 2019).

meratanya sosialisasi oleh stakeholder DP3A Kota Semarang terhadap masyarakat sehingga belum semua masyarakat mengetahui tentang perda perlindungan perempuan (Mahartiwi, 2018) 5) masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Data KDRT oleh DPPPA Kota Semarang, 2016-2020) 6) meningkatnya rasio KDRT (Data RKPD Kota Semarang, 2020) 7) meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan (Data Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan oleh DP3A Kota Semarang, 2015-2018). Belum optimalnya pelaksanaan peran stakeholder tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul ‘‘Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang.’’

KAJIAN TEORI

Menurut Nugroho (2014) membagi peranan dan tanggung jawab stakeholder menjadi beberapa bagian yaitu : 1) *Policy Creator*, yaitu stakeholder yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan 2) Koordinator yaitu stakeholder yang memiliki peran sebagai koordinator stakeholder lain dan terlibat dalam program tersebut 3) Fasilitator yaitu stakeholder yang memiliki peran untuk memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok di dalam program tersebut 4) Implementor yakni stakeholder pelaksana kebijakan termasuk kelompok sasaran program yang diselenggarakan 5) Akselerator

yaitu stakeholder yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi supaya program bisa berjalan lancar atau lebih cepat dari waktu yang ditargetkan.

Menurut Ndraha (2005:57)

- a) pihak pemerintah merupakan seluruh alat perlengkapan negara dan lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi sebagai alat guna meraih tujuan negara.
- b) Pihak NGO (lembaga masyarakat) merupakan pihak yang berasal dari kalangan lembaga masyarakat non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk membantu pelaksanaan program
- c) pihak swasta merupakan stakeholder yang berasal dari kalangan bisnis yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk membantu mempercepat pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan & menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu & kelompok (Sukmadinata,

2007). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran setiap stakeholder dalam program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*.

PEMBAHASAN

Identifikasi stakeholder

Stakeholder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu 1) stakeholder pemerintah 2) stakeholder NGO (lembaga masyarakat) 3) stakeholder swasta. Stakeholder Pemerintah terdiri dari DP3A Semarang, PPT Seruni Semarang, Dinas Sosial Semarang dan Dinas Pendidikan Semarang. Stakeholder NGO terdiri dari Tim Penggerak PKK Semarang dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang. Stakeholder swasta terdiri dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak

Indonesia (APSAI) Semarang dan Bank Mandiri Semarang.

Peran Stakeholder

A. Stakeholder Pemerintah

Stakeholder pemerintah terdiri dari DP3A Semarang, PPT Seruni Semarang, Dinas Pendidikan Semarang dan Dinas Sosial Semarang menjalankan peran sebagai 1) *policy creator* 2) koordinator 3) fasilitator 4) implementor. Pelaksanaan peran tersebut anataralain 1) peran sebagai *policy creator* belum berjalan optimal hal ini dikarenakan factor ekonomi menjadi penghambat untuk mencapai

tujuan program dalam mengurangi angka KDRT. 2) Pelaksanaan peran sebagai koordinator belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan factor ekonomi dan budaya patriarki yang menghambat peran stakeholder sebagai koordinator untuk mencapai tujuan program yaitu mengurangi KDRT di Semarang 3) Peran stakeholder sebagai fasilitator oleh PPT Seruni belum berjalan dengan optimal dikarenakan adanya hambatan factor ekonomi dan factor budaya patriarki. Faktor ekonomi berupa kondisi ekonomi yang buruk ditambah biaya hidup tinggi sering menimbulkan pertengkaran sehingga menyebabkan terjadinya KDRT. Faktor budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan seolah-olah membolehkan laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan menyebabkan angka KDRT di Semarang masih tetap tinggi 4) Peran stakeholder sebagai implementor Pelaksanaan peran sebagai implementor belum berjalan optimal

hal ini terbukti dari ditemukannya permasalahan berupa 1) masih kurangnya komitmen dari masyarakat dan DP3A Kota Semarang dalam pencegahan KDRT 2) masih tingginya angka KDRT di Kota Semarang 3) pelaksanaan program yang belum mencerminkan adil gender.

B. Stakeholder NGO

Stakeholder NGO terdiri dari Tim Penggerak PKK Semarang dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. 1) pelaksanaan peran sebagai fasilitator belum dapat berjalan optimal oleh Tim Penggerak PKK Semarang, hal ini dikarenakan selama menjalankan program pencegahan KDRT di Semarang, Tim Penggerak PKK Semarang belum memiliki sarana & prasarana yang memadai sehingga untuk melaksanakan perannya sebagai fasilitator Tim Penggerak PKK Semarang harus meminjam dari Pemerintah Kota Semarang, hal ini dinilai akan menghambat bagi pelaksanaan peran Tim Penggerak

PKK Semarang sebagai fasilitator 2) pelaksanaan peran sebagai implementor oleh YKKS dan Tim Penggerak PKK Semarang belum dapat berjalan optimal hal ini dikarenakan selama menjalankan perannya terdapat kendala dalam hal terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi pencegahan KDRT di level bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sehingga hal ini menghambat di dalam pelaksanaan peran sebagai implementor. Selain itu, kurangnya komitmen dari masyarakat dan DP3A Semarang sebagai stakeholder pemerintah juga turut menghambat di dalam melaksanakan program pencegahan KDRT di Semarang menjadi kurang optimal.

Sementara itu, pada pelaksanaan peran sebagai implementor oleh Tim Penggerak PKK Semarang masih ditemukan hambatan berupa belum beraninya warga untuk berbicara mengenai KDRT yang mereka alami hal ini dinilai menghambat di dalam

pelaksanaan program pencegahan, apabila korban tidak berani berbicara maka KDRT juga akan sulit dicegah karena pencegahan dan penanganan itu saling berkaitan dalam pelaksanaan kinerja peran stakeholder sebagai implementor.

C. Stakeholder Swasta

Stakeholder swasta terdiri atas APSAI Semarang dan Bank Mandiri Semarang. Pelaksanaan peran sebagai akselerator telah berjalan baik hal ini dapat dilihat dari bagaimana APSAI Semarang & Bank Mandiri Semarang melaksanakan perannya sebagai akselerator yang membantu stakeholder pemerintah untuk melaksanakan program pencegahan KDRT dengan membantu mengadakan sosialisasi pencegahan KDRT, webinar pencegahan KDRT secara *online*, memberikan CSR untuk pelaksanaan program, membantu mencegah KDRT dari sisi ketahanan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi Warga Semarang.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Stakeholder diidentifikasi menjadi tiga yaitu a) stakeholder pemerintah b) stakeholder NGO dan stakeholder swasta. Diantara ketiga stakeholder tersebut, stakeholder swasta yang telah menjalankan peran paling baik.

Diantara pelaksanaan peran sebagai 1) *policy creator* 2) koordinator 3) fasilitator 4) implementor dan 5) akselerator pelaksanaan peran sebagai akselerator yang paling baik diantara pelaksanaan lainnya. Hal ini karena stakeholder tersebut sudah banyak membantu pemerintah dengan CSR dan pelaksanaan sosialisasi pencegahan KDRT. Stakeholder NGO (lembaga masyarakat) merupakan stakeholder yang telah melaksanakan perannya cukup baik dengan melakukan berbagai sosialisasi secara *online* maupun *offline* dari tingkatan paling atas sampai tingkatan terkecil dalam masyarakat yaitu Dasa Wisma namun

pelaksanaan peran tersebut belum optimal dikarenakan masih belum memadainya sarana & prasarana dalam menjalankan peran. Sementara itu, stakeholder pemerintah telah menjalankan perannya cukup baik, namun belum optimal hal ini dikarenakan masih kurangnya komitmen DP3A Semarang dan masih tingginya angka KDRT di Semarang, pelaksana kebijakan yang belum benar-benar mengerti persoalan KDRT

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran dari peneliti terhadap pelaksanaan peran stakeholder dalam program pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang anataralain :

- a) Pada pelaksanaan peran stakeholder sebagai fasilitator ditemukan permasalahan Tim Penggerak PKK Kota Semarang yang belum

memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi pencegahan KDRT sehingga harus meminjam pada Pemerintah Kota Semarang saran dari peneliti, Tim Penggerak PKK Kota Semarang bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang tergabung dalam APSAI Kota Semarang guna pengadaan sarana dan prasarana untuk sosialisasi pencegahan KDRT di Kota Semarang.

- b) Pada pelaksanaan peran stakeholder sebagai implementor ditemukan permasalahan berupa kurangnya komitmen dari masyarakat dan DP3A Kota Semarang untuk mencegah terjadinya KDRT. Stakeholder lain seperti PPT Seruni, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Yayasan

Kesejahteraan Keluarga Semarang (YKKS), APSAI Kota Semarang, Bank Mandiri Semarang perlu saling menguatkan komitmen dengan stakeholder DP3A Kota Semarang dan terus mendorong masyarakat agar bersama-sama mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang sehingga angka KDRT betul-betul dapat ditekan.

- c) Pada permasalahan kurangnya dana untuk mengadakan sosialisasi pencegahan KDRT di tingkat bawah seperti RT dan RW, APSAI bisa mempertimbangkan untuk memberikan dana CSR perusahaan pada daerah-daerah yang rawan terjadi KDRT sehingga perangkat RT dan RW bisa mengadakan pertemuan dan sosialisasi

pengecegan KDRT di lingkungan RT dan RW.

- d) Pada permasalahan masih tingginya angka KDRT di Kota Semarang dapat dikurangi dengan menekan faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Kota Semarang. Pada faktor ekonomi diselenggarakannya pelatihan dibidang ekonomi digital seperti cara menggunakan *e-commerce Shoope, Tokopedia, Go Food, Lazada, Buka Lapak* dan *JD-ID* untuk berjualan *online* sehingga penghasilan yang diperoleh bukan hanya dari *offline* saja, namun dari *online* juga dengan pangsa pasar yang lebih luas. Faktor budaya patriarki dapat ditekan dengan cara membangun rasa

saling menghargai antara laki-laki dan perempuan tanpa menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan sehingga terbangun presepsi bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan sama-sama layak untuk diperlakukan dengan adil dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat. Faktor Kota Semarang sebagai kota yang kompleks dapat ditekan dengan membangun kesadaran bahwa KDRT merupakan persoalan sosial, bukan hanya individu sehingga diperlukan kerjasama dengan semua penghuni Kota Semarang baik pendatang maupun warga Kota Semarang asli untuk bersama-sama mencegah terjadinya KDRT di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Chris Ansell & Alison Gash. (2014). *Pragmatist Democracy : Evolutionary Learning as Public Philosophy*. New York: Oxford University Press, Inc.

Djumara, N. (2008). *Negosiasi, Peran dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.

Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung : Pustaka Setia.

Herdiansyah, Haris. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial : Perspektif Konvensional dan Kontemporer Edisi 2*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.

Nugroho, Riant. *Gender & Administrasi Publik : Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Jurnal :

Andini, Thatit Manon dkk. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(1): 13-28.

Darwis, R. S. (2019). Peran Pemerintah Dalam Peran Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* , 1-19.

Galistya, Theresia Mutiara. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1): 19-27.

Kennedy, Bernice Roberts. (2017). Global Perspective on Violence of Women and Children:

- Advocacy on Preventing 21 Century Slavery. *BRK Global Healthcare Journal*, 1(1): 1-20.
- Maknun, Lulu'il. (2016). Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua yang Stress. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12(2): 117-124.
- Mahartiwi, Shelma Janu dan Ari Subowo. (2018). Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan). *Jurnal Administrasi Publik UNDIP* , 1-19.
- Mahfud, Muhammad Ali Zuhri dkk. (2014). Peran dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(12) : 2070-2076.
- Noviani, Utami Zahirah. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian & PPM* 5(1): 480-55.
- Satriawan dkk. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, 3(1): 37- 48.
- Susanty, Dewi Indah & Nur Julqurniati. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Flores Timur. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8(2): 27-44.
- Sakina, Ade Irma & Dessy Hasanah Siti A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *118Share : Social Work Jurnal*, 7(1): 1-129.
- Utami, Penny Naluria. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara

Barat. *Jurnal HAM*, 9
(1): 1-17.

Wati, K. &. (n.d.). Peran
Stakeholder Dalam
Implementasi
Kebijakan
Perlindungan
Perempuan Dari Tindak
Kekerasan di Kota
Semarang.
Administrasi Publik , 1-
16.

Internet:

Budiman, Tika Vilystya.(2020). Jawa
Tengah Darurat Kekerasan
Seksual Terhadap Perempuan.
Dalam
[https://rri.co.id/nasional/768910/ja
wa-tengah- darurat-kekerasan-
seksual-terhadap-perempuan](https://rri.co.id/nasional/768910/jawa-tengah-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan).
Diunduh pada 16 Juni 2020 pukul
11: 32 WIB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Semarang. (2020). Dalam
[http://siga.dp3a.semarangkota.go.i
d/?dari_tanggal=01-01-
2016&sampai_tanggal=1402020
&kecamatan=&lokasi_korban=&l
okasi_pela ku](http://siga.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2016&sampai_tanggal=1402020&kecamatan=&lokasi_korban=&lokasi_pelaku=)=. Diunduh pada 14
Juni 2020 pukul 17: 55 WIB.

UNILA. BAB II SKRIPSI. Dalam
[http://digilib.unila.ac.id/14145/18/
BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/14145/18/BAB%20II.pdf). Diunduh Pada 17
Juni 2020 pukul 18: 20 WIB.

UNY. BAB II SKRIPSI. Dalam
[https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e
. %20Bab%20%2009417144028](https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%20%2009417144028).

[pdf](#) . Diunduh pada 29 Januari
2020 pukul 1:23 WIB.

Universitas Psikologi. (2019).
Pengertian Pendidikan Karakter
dan Aspeknya Menurut Para
Ahli. Dalam
[https://www.universitaspsikologi.
com/2019/11/pengertian-
pendidikan-karakter-dan-aspek-
karakter-menurut-ahli.html](https://www.universitaspsikologi.com/2019/11/pengertian-pendidikan-karakter-dan-aspek-karakter-menurut-ahli.html).
Diunduh pada 15 April 2021
pukul 14:00 WIB.